

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYEDIAAN AIR BERSIH DI KECAMATAN INUMAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Vivin Delvya Roza*

Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Riau, Indonesia
Corresponding Author: vivin.delvy4281@student.unri.ac.id

Sujianto

Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Riau, Indonesia
e-mail: fisip_suji@yahoo.com

ABSTRACT

Provision of clean water needs it the responsibility of the central or regional government which must be met by the community. The purpose of this study is to analyze and describe how the implementation of the clean water supply policy in Inuman District and find out what are the inhibiting factors in its implementation as seen from standard indicators and policy objectives, resources, inter-organizational relations, characteristics of implementing agents, social environment, economy, politics and the disposition of the implementer. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. The results of this study indicate that the implementation of clean water supply policies in Inuman Districts has not run optimally, has not been able to meet policy standards, especially in terms of quantity, quality and continuity of water. Likewise with the policy target, it is found that many people in Inuman District have not had access to clean water from PAB. The existence of limited human resources in terms of number and expertise is indicated by the many complaints from the community regarding the length of the repair process if damage occurs the limited financial resources and lack of infrastructure in distributing clean water. Coordination between policy implementing agencies through face-to-face meetings and communication through the network has been carried out but the frequency of meetings is not fixed so that effective communication has not been seen. In the social environment there are still many people who cannot be served by PAB, in an economic environment low tariffs prevent PAB from investing in clean water supply and support from political actors helps achieve policy goals. The attitude of the executor is disciplined towards directions but the absence of incentives affects employee morale, then it has inhibiting factors, namely the lack of budget and human resources and the poor quality of raw water.

Keywords : *Policy Implementation, Clean Water Supply.*

ABSTRAK

Penyediaan kebutuhan air bersih merupakan tanggung jawab dari pemerintah pusat atau daerah yang harus dipenuhi kepada masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana implementasi kebijakan penyediaan air bersih di Kecamatan Inuman serta mengetahui apa faktor penghambat dalam pelaksanaannya yang dilihat dari indikator standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, lingkungan sosial, ekonomi, politik dan disposisi implementator. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi kebijakan penyediaan air bersih di Kecamatan Inuman belum berjalan optimal, belum mampu memenuhi standar kebijakan terutama dalam kuantitas, kualitas dan kontinuitas air. Begitu juga dengan sasaran kebijakan didapatkan banyaknya masyarakat Kecamatan Inuman yang belum mendapatkan akses air bersih dari PAB. Adanya keterbatasan sumber daya manusia dari segi jumlah dan keahliannya ditandai dengan banyaknya keluhan dari masyarakat terkait lamanya proses perbaikan jika terjadi kerusakan, kemudian terbatasnya sumber daya dana dan kekurangan sarana prasarana dalam mendistribusikan air bersih. Koordinasi antar badan pelaksana kebijakan melalui rapat secara langsung dan komunikasi melalui jaringan sudah terlaksana namun frekuensi pertemuan tidak tetap sehingga komunikasi efektif belum terlihat. Pada lingkungan sosial masih banyak masyarakat yang belum bisa dilayani oleh PAB, pada lingkungan ekonomi rendahnya tarif menyebabkan PAB tidak dapat melakukan investasi penyediaan air bersih serta dukungan dari aktor politik membantu pencapaian tujuan kebijakan. sikap pelaksana dipislin terhadap arahan namun tidak adanya insentif mempengaruhi semangat kerja pegawai. Kemudian memiliki faktor penghambat yakni kekurangan anggaran dan sumber daya manusia serta adanya kualitas air baku yang buruk.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Penyediaan Air Bersih

PENDAHULUAN

Air adalah kebutuhan dasar bagi seluruh makhluk hidup termasuk manusia, karena manusia tidak bisa hidup tanpa air. Setiap manusia memiliki hak mendapatkan akses air bersih dalam rangka pemenuhan kebutuhan serta untuk meningkatkan kesehatan lingkungan. Air adalah kebutuhan pokok yang keberadaannya telah diatur dalam konstitusi negara Indonesia pasal 33 UUD 1945 ayat 3 yaitu Bumi, dan air dan kekayaan alam yang terkandung di

dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Memenuhi ketentuan dalam UUD 1945 terkait penyediaan air bersih Pemerintah telah mengeluarkan beberapa aturan diantaranya, Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum yang pada dasarnya hampir sama dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 pada pasal 36 disebutkan bahwa penyelenggaraan sistem penyediaan air minum menjadi tanggungjawab pemerintah baik itu pusat atau daerah dimana dalam pelaksanaannya pemerintah daerah dapat menunjuk badan usaha sebagai penyedia air bersih agar dapat memenuhi kehidupan yang sehat, bersih dan produktif bagi warganya.

Menyadari Kewajiban Pemerintah Daerah dalam penyediaan air bersih yang mana pada pelaksanaannya, pemerintah daerah bisa mendirikan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), maka Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi membentuk sebuah UPTD Penyediaan Air Bersih Unit Kecamatan Inuman dengan air baku utamanya dari sungai Indragiri atau Sungai Batang Kuantan. Tujuan dibentuknya PAB adalah sebagai sumber utama untuk mencukupi kebutuhan masyarakat akan air bersih, melakukan proses produksi dan distribusi air bersih yang memiliki kualitas baik secara cukup dan terus menerus kepada masyarakat Kecamatan Inuman.

Dalam pelaksanaan diketahui bahwa PAB Unit Kecamatan Inuman memiliki kapasitas produksi hanya sebesar 10 L/Detik dengan waktu pengoperasian rata-rata 4 jam/hari, yang artinya PAB Unit Kecamatan Inuman hanya mampu memproduksi air bersih sebanyak 144.000 L/Hari. Padahal Kecamatan Inuman adalah Kecamatan yang memiliki populasi pelanggan terbilang padat daripada Kecamatan lainnya yakni sebanyak 822 sambungan rumah dengan rata-rata setiap rumah terdiri dari 4 orang sehingga didapatkan perhitungan kebutuhan air bersih seluruh pelanggan PAB Unit Kecamatan Inuman dalam 1 hari adalah sebanyak 197.280 L/Hari. Oleh karena itu dengan kemampuan produksi tersebut PAB Unit Kecamatan Inuman hanya mampu memenuhi sekitar 72% dari kebutuhan seluruh pelanggan.

Pelayanan penyediaan air oleh PAB Unit Kecamatan Inuman dimulai dari pukul 07.00 Wib sampai dengan pukul 18.00 Wib, yang mana setiap sambungan rumah hanya mendapatkan aliran air PAB rata-rata 4 jam/hari. Padahal jika berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum pada Pasal 4 ayat 5 disebutkan bahwa Kontinuitas pengaliran Air Minum harus memberikan jaminan pengaliran selama 24 jam/hari. Sehingga fakta yang ada di PAB Unit Kecamatan Inuman belum sesuai dengan peraturan yang ada

Kualitas air, UPTD Penyediaan Air Bersih (PAB) Unit Kecamatan Inuman mengandalkan air baku utamanya berasal dari air Sungai Indragiri/ Kuantan, dimana kualitas air sungai batang kuantan berdasarkan hasil analisa

laboratorium berada diatas kelas II dan hampir mendekati kualitas air pada kelas III, airnya mengandung kadar logam merkuri (Hg) dan zat besi/ferum (Fe) yang cukup tinggi. Walaupun pH airnya masih berada dalam taraf normal tapi secara fisik kondisi air sungai batang kuantan terutama di Kecamatan Inuman berwarna sangat keruh (kuning kecokelatan). Tingkat kekeruhan air yang sangat tinggi, penyebab utamanya adalah adanya pengusaha yang mengambil bebatuan dan pasir (tambang galian C) di hulu sungai dengan alat berat dan banyaknya penambanangan emas tanpa izin yang tentunya sangat berpengaruh terhadap kualitas air baku. Tingkat kekecurahan air yang sangat tinggi tersebut menyebabkan air bersih tidak dapat terbentuk karena air yang mengalir kerumah warga berwarna keruh dan sedikit berbau sehingga airnya tidak dapat diminum secara langsung.

Menyimak fenomena upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan berupa penyediaan air bersih kepada masyarakat Kecamatan Inuman diatas, penulis ingin melakukan penelitian terhadap implementasi kebijakan berdasarkan peraturan yang difokuskan pada beberapa variabel diantaranya: standar dan sasaran program, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik badan pelaksana, lingkungan sosial ekonomi dan politik serta sikap pelaksana.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Creswell (Raco, 2013) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah satu pendekatan guna menemukan dan memahami satu gejala sentral. Oleh karena itu dalam penelitian dengan metode kualitatif ini peneliti mewawancarai informan yang universal dan agak luas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Standar dan Sasaran Program

Menurut Van Metter dan Van Horn dalam Kadji (2018:54) standar dan sasaran dari suatu kebijakan harus memiliki ketentuan yang pasti dan terukur. Dalam pelaksanaannya jika dilihat dari indikator standar implementasi kebijakan penyediaan air bersih di Kecamatan Inuman adalah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum, PAB Unit Kecamatan Inuman belum mampu mengikuti standar terutama dalam hal kuantitas, kualitas dan kontinuitas air. PAB Unit Kecamatan Inuman belum mampu memenuhi sasaran kebijakan ditandai dengan banyaknya masyarakat yang belum mendapatkan akses air bersih.

Hubungan Antar Organisasi

Menurut Van Metter dan Van Horn dalam Kadji (2018:54) memaparkan

bahwa sebuah implementasi kebijakan dibutuhkan adanya bentuk kerja sama yang terjalin dengan baik antar badan pelaksana kebijakan yang telah ditetapkan dalam bentuk komunikasi dan koordinasi. Dapat dilihat komunikasi dan koordinasi internal antar badan pelaksana kebijakan yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, UPTD Penyediaan Air Bersih Kabupaten Kuantan Singingi dan PAB Unit Kecamatan Inuman sudah berjalan ditandai dengan adanya koordinasi langsung melalui rapat-rapat yang dilakukan serta komunikasi tidak langsung melalui telepon dan whatsapp mengenai pembahasan penyediaan air bersih hanya saja frekuensi pertemuan tidak tetap sehingga komunikasi efektif belum terlihat. Kemudian kurangnya komunikasi antar badan pelaksana kebijakan dengan masyarakat ditandai dengan banyaknya terjadi kerusakan fasilitas yang disediakan oleh PAB dan tidak diperbaiki sehingga mengganggu proses distribusi air. Begitu juga dengan banyaknya keluhan dari pelanggan/masyarakat terkait pelayanan yang diberikan oleh pegawai PAB Unit Kecamatan Inuman karena sulit dihubungi ketika terjadi kerusakan.

Sumber Daya

Menurut Van Metter dan Van Horn dalam Kadji (2018:54) memaparkan dukungan sumber daya yakni sumber daya manusia, dana dan sarana prasarana layak mendapatkan perhatian karena ketersediaan sumber daya tersebut dapat berperan sebagai faktor pendukung sebuah implementasi kebijakan. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia menyebabkan pelaksanaan kebijakan penyediaan air bersih di Kecamatan Inuman kurang maksimal. Disamping itu dukungan dana yang terbatas juga merupakan salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan yang ditandai dengan kurangnya ketersediaan sarana prasarana dalam pelayanan penyediaan air bersih sehingga hal tersebut berdampak pada sedikitnya capaian cakupan pelayanan yang dilakukan oleh PAB Unit Kecamatan Inuman sejak tahun 2017.

Karakteristik Badan Pelaksana

Menurut Van Metter dan Van Horn dalam Kadji (2018:54) memaparkan bahwa ketika hendak mengapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan dengan maksimal maka dibutuhkan identifikasi dan penting untuk mengetahui agen pelaksana yang terlibat Karakteristik badan pelaksana dengan kewenangan yang dominan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Namun walaupun masih dominannya kewenangan tersebut bukan merupakan suatu penghambat dalam pelaksanaan kebijakan, justru dapat mempercepat proses pencapaian sasaran kebijakan penyediaan air bersih. Dalam implementasi kebijakan penyediaan air bersih di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi sudah memiliki SOP dan ketentuan yang jelas. Kemudian badan

pelaksana kebijakan sudah mengetahui terkait tugas dalam memberikan penyediaan air bersih sesuai dengan ketentuan SOP. Namun karena masih kekurangan sumber daya manusia penyediaan layanan yang efektif kepada masyarakat Kecamatan Inuman belum bisa terbentuk.

Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Menurut Van Metter dan Van Horn dalam Kadji (2018:54) menjelaskan bahwa kondisi sosial ekonomi dan politik berhubungan dengan kelompok sasaran kebijakan, Pada aspek lingkungan ekonomi, rendahnya tarif air menyebabkan PAB Unit Kecamatan Inuman tidak dapat melakukan investasi untuk penyediaan air bersih terutama dalam pemenuhan ketersediaan sarana prasarana, tarif yang berlaku sekarang hanya cukup untuk menutupi biaya operasional PAB Unit Kecamatan Inuman agar distribusi air kepada masyarakat tetap berjalan. Pada aspek lingkungan sosial, masih banyak masyarakat Kecamatan Inuman yang belum mampu dilayani oleh PAB karena tidak dibukaknya sambungan baru selama 3 tahun terakhir yang menyebabkan rendahnya cakupan pelayanan penyediaan air bersih di Kecamatan Inuman. Pada aspek lingkungan politik dukungan dari aktor politik dalam hal ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuantan Singingi juga memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan penyediaan air bersih yang ditandai dengan persetujuan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal ke UPTD Penyediaan Air Bersih.

Disposisi Implementator

Menurut Van Metter dan Van Horn dalam Kadji (2018:54) memaparkan bahwa dalam proses pelaksanaan kebijakan sikap implementator sangat memberikan pengaruh. Sikap pelaksana yang cenderung untuk patuh pada perintah atasan melahirkan komitmen kerja yang tinggi, namun PAB Unit Kecamatan Inuman belum mampu memberikan intensif kepada pegawai karena merupakan instansi pemerintah sehingga hal tersebut mempengaruhi semangat kerja pegawai dalam hal pemberian layanan kepada masyarakat Inuman. Hal ini ditandai dengan lamanya waktu yang dibutuhkan dalam memperbaiki kerusakan dan dalam memberikan respon cepat kepada masyarakat.

PENUTUP

Hasil penelitian dan analisa tentang implementasi kebijakan penyediaan air bersih di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi yang sudah penulis lakukan memberikan beberapa kesimpulan dan saran antara lain;

1. Implementasi kebijakan penyediaan air bersih di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi dapat disimpulkan melalui indikator keberhasilan sudah dilakukan namun belum optimal. Karena pada

pelaksanaannya hingga sampai saat ini tujuan yang ingin dicapai yaitu terpenuhinya ketersediaan air bersih yang merata bagi masyarakat Kecamatan Inuman belum terpenuhi, ditemukan masih banyaknya masyarakat Kecamatan Inuman yang belum mendapatkan akses air bersih dari PAB disebabkan tidak adanya pembukaan sambungan baru. Karena dari beberapa indikator keberhasilan menurut Van Metter Van Horn dalam Kadji (2018:54) terdapat beberapa indikator yang tidak berjalan dengan optimal.

2. Dalam penelitian ini didapatkan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan penyediaan air bersih di Kecamatan Inuman yakni kekurangan anggaran, tidak mencukupinya sumber daya manusia dan kualitas sumber air baku yang buruk.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustino, L. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter Van Horn: The Policy*
- Agustino, L. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung
- Budianto. 2020. *Kecamatan Inuman Dalam Angka 2020*. M&N Grafika. Kuantan Singingi
- Budianto. 2021. *Kecamatan Inuman Dalam Angka 2021*. BPS Kabupaten Kuantan Singingi
- Candra, A. 2020. *Analisis Sistem Pengolahan dan Distribusi Air Bersih (UPTD-PAB) Terhadap Masyarakat Kota Teluk Kuantan*. JPS. 2. 1.
- Edward III, George C (edited). 1990. *Public Policy Implementing*, Jai Press Inc, London England. Goggin, Malcom L et al. Grindle, M.S 1980. *Politics And Policy Implementation In The Third World*. New Jersey: Prinsetown University Press.
- Handoyo, E, 2012. *Kebijakan Publik*. Kebijakan Publik Deliberatif.
- Herdiansyah, H. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- J.R, Raco. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.
- Kadji, Yulianto. 2018. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas*. Universitas Negeri Gorontalo Press. Gorontalo.
- Keban, Yermias T. (2004). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media
- Miles, B. Matthew dan A. Michel Huberman. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA : Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. PT Elex Media Computindo. Jakarta
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy: Dinamika Kebijakan. Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta : PT. Elex Media Computindo. Jakarta
- Subarsono.2005. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Alfabeta. Bandung.
- Sulaiman, Affan. 1998. *Public Policy-Kebijakan Pemerintah, Bandung*: BKU Ilmu Pemerintahan Program Magister Ilmu-Ilmu Sosial. Institut Ilmu Pemerintahan Kerjasama UNPAD-IIP.

- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI
- Tahir. Muh. 2011. *Pengantar Metodologi Penelitian Pendidikan*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Widodo, Joko. 2011. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia
- Winarno, B. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS

Jurnal

- Bistama, S. 2018. *Implementasi Kebijakan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PASIMAS) Di Kabupaten Probolinggo*. Jurusan Ilmu Administasi Publik. Malang.
- Suhartini. 2008. *Analisis Kandungan Nitrat Air Sumur Masyarakat di Sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Piyungan Desa Situmulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul DIY*. Jurnal. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Supardi, K. 2019. *Analisis Kualitas Pelayanan Publik (Studi Pelayanan Penyediaan Air Bersih) Di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi*. Program Studi Ilmu Administasi Publik. Pekanbaru.
- Suyeno, Wijaya, Hanafi. 2014. *Implementasi Kebijakan Pelayanan Air Bersih Wilayah Perkotaan Berbasis Kerjasama Pemerintah dan Swasta di Kecamatan Mandau*. Fakultas Ilmu Administrasi. Malang
- Tuti, WD dan Firmansyah. 2021. *Implementasi Pembagian Alokasi Air Bersih Kepada Masyarakat di Daerah Rawan Bencana Kota Tangerang Selatan*. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi. 4.1.
- Walinono. 2017. *Implementasi Kebijakan Penyediaan Air Bersih Di Kota Pare-Pare*. Lembaga Administrasi Negara. Makasar.

Peraturan

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
- Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum.
- Undang-Undang 1945 Pasal 33 Ayat 3 Tentang Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam.
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 dimana penyelenggaraan sistem penyediaan air minum.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416 Tahun 1990 Tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air.
- Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Penyediaan Air Bersih Kabupaten Kuantan Singingi.

Internet

<https://www.gatra.com/news-502533-hukum-peti-gejorak-batang-kuantan-dengan-merkuri-pemprov-bungkang.html> (Diakses tanggal 14 Juli 2022, pada pukul 10.00 Wib)

Kurnia. F (2021). PETI Gejorak Batang Kuantan dengan Merkuri, Pemprov Bungkam.

<http://pdamtirtanadi.co.id/kelompok-atau-golongan-pelanggan>. (Diakses tanggal 6 November 2022)

Tirtanadi. PDAM (2022). Kelompok atau Golongan Pelanggan.